

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta diikuti usaha untuk pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994). Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja.

Masalah-masalah pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kondisi yang berbeda - beda pada setiap daerah akan berpengaruh terhadap corak pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, sehingga dalam proses pembangunan ekonomi daerah harus mempertimbangkan setiap potensi ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan hak, kewajiban dan wewenang bagi daerah untuk mengatur sendiri urusan – urusan pemerintahan di daerahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang – undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mengemukakan tentang kewenangan daerah untuk melaksanakan program pembangunan di daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun program dan rencana daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut (Rahayu dan Soebagiyo, 2004). Hal tersebut juga telah membawa perubahan mendasar dalam proses pembangunan nasional saat ini. Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut telah memberikan peluang kepada setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lokal baik sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia di daerah. Daerah cenderung memaksimalkan berbagai potensi sumberdaya tersebut dalam perencanaan pembangunan baik sebagai sumber pendapatan maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Setiap daerah harus jeli dan benar – benar memperhatikan sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan mengolah potensi yang dimilikinya agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga setiap daerah dapat membiayai belanja daerah termasuk membiayai pembangunan di daerahnya sendiri serta dapat menciptakan lapangan kerja yang optimal.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasari pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad, 2004: 298).

Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki daerah sangat mempengaruhi proses peningkatan keuangan daerah yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang optimal dan mencapai stabilitas ekonomi. Agar upaya tersebut dapat mencapai hasil yang optimal maka dalam mengambil kebijakan perlu memperhitungkan kondisi internal maupun eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanya terletak pada jangkauan wilayah. Kondisi internal hanya meliputi wilayah daerah dan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional atau wilayah yang dianggap lebih luas. Dalam studi penelitian ini akan memfokuskan analisis perkembangan ekonomi regional dan keterkaitannya dengan struktur tenaga kerja khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan referensi struktur tenaga kerja yang ada di wilayah nasional. Wilayah nasional dipilih sebagai wilayah referensi karena struktur tenaga kerja di Propinsi D.I.Yogyakarta dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi tenaga kerja di tingkat nasional.

Gambaran struktur tenaga kerja dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu berdasarkan lapangan pekerjaan, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan. Sebaran tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor

produksi mana saja para pekerja menyandarkan sumber nafkahnya. Lapangan pekerjaan utama dibagi menjadi 9 sektor ekonomi, yaitu (Dumairy,1997:82) :

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

Dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial di daerah selain menggunakan output sebagai variabel yang diperbandingkan untuk melihat peranan suatu sektor dalam pertumbuhan ekonomi, dapat juga digunakan variabel penyerapan tenaga kerja. Masing – masing sektor tidak sama kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang ada, banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam sektor – sektor perekonomian tersebut mengindikasikan potensi sektor-sektor perekonomian. Kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel distribusi persentase penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja utama.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja mengalami naik turun. Namun secara umum yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian. Peran sektor pertanian dalam kemampuannya

menyerap tenaga kerja mulai tergeser oleh sektor lain. Secara sekilas pergeseran penyerapan tenaga kerja ini menunjukkan besar kecilnya kemampuan setiap sektor terhadap perekonomian. Sektor yang semakin banyak atau mengalami peningkatan dalam menyerap tenaga kerja biasanya dianggap sebagai sektor potensial dan direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun hal ini tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan suatu kebijakan, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi sektor yang benar-benar layak untuk dikembangkan.

Tabel 1.1
Distribusi Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut Lapangan Kerja Utama
Propinsi D.I.Yogyakarta
Tahun 2001-2005
(dalam %)

No	Lapangan Kerja Utama	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	39,62	36,81	39,25	38,59	34,37
2	Pertambangan & Penggalian	0,57	0,68	0,43	1,57	0,53
3	Industri Pengolahan	12,29	13,79	12,90	11,23	13,09
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,30	0,34	0,21	0,15	0,25
5	Bangunan	6,03	6,94	7,46	6,11	7,71
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	21,33	20,99	22,16	23,12	24,17
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,29	2,57	2,42	3,12	3,33
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,52	1,42	0,85	0,52	1,81
9	Jasa – jasa	15,05	16,46	14,31	15,60	14,74
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Propinsi D.I.Yogyakarta

Secara umum dikemukakan ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pengklasifikasiannya adalah faktor fisik dan faktor manajemen, secara spesifik disebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan

penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja seharusnya suatu daerah menjadi semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif (Asaddin dan Wijaya,2001). Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting, tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja yang semakin besar akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk melihat potensial atau tidaknya suatu sektor kita dapat mengidentifikasi dengan melihat seberapa besar setiap sektor yang ada mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap maka bisa dikatakan bahwa sektor tersebut mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dapat dijadikan indikasi pertumbuhan ekonomi.

Masalah penyediaan lapangan kerja merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan baik di daerah maupun nasional. Semakin tinggi tingkat produktivitas lapangan kerja, semakin besar pula pilihan yang tersedia bagi sumber daya manusia yang ada. Di lain pihak, jika terdapat pengangguran di suatu daerah berarti ini menunjukkan kurang efisiennya pemanfaatan modal dasar yang tersedia di suatu daerah. Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu cara meningkatkan pemerataan pembangunan dan sarana untuk meningkatkan kehidupan

yang layak bagi masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penambahan jumlah angkatan kerja yang cepat.

Tabel 1.2
Penduduk dan Angkatan Kerja Propinsi D.I.Yogyakarta
Tahun 2001-2005

Tahun	Penduduk (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Angkatan Kerja (%)
2001	3.327.945	1.699.175	62.99
2002	3.360.348	1.739.164	64.45
2003	3.207.385	1.764.007	63.84
2004	3.220.808	1.815.362	71.73
2005	3.281.800	1.851.209	71.95

Sumber : D.I.Y Dalam Angka, berbagai edisi
BPS, SAKERNAS

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa angkatan kerja dari tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah persentasenya terus bertambah dari total keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Propinsi D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2005 penduduk Propinsi D.I. Yogyakarta tercatat 3.281.800 orang, presentase penduduk umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 71,95 persen merupakan angkatan kerja (68,31 persen adalah penduduk yang bekerja dan 3,63 persen merupakan pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 28,05 persen merupakan bukan angkatan kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang merupakan angkatan kerja belum terserap seluruhnya ke dalam sektor- sektor perekonomian yang ada. Di Propinsi D.I.Yogyakarta jumlah pencari kerja dari periode tahun 2001 – 2005 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia.

Tabel 1.3
Jumlah Pencari pekerjaan dan Lowongan di Propinsi D.I.Yogyakarta
Tahun 2001-2005
(dalam satuan orang)

Tahun	Jumlah Pencari Pekerjaan	Lowongan
2001	83.582	4.928
2002	106.923	10.656
2003	94.881	13.288
2004	133.347	19.573
2005	168.339	17.041

Sumber : D.I.Yogyakarta Dalam Angka 2005

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan besarnya jumlah pencari pekerjaan. Pada tahun 2005 jumlah pencari pekerjaan mencapai 168.339 orang sedangkan lowongan yang tersedia hanya untuk 17.041 orang. Ini merupakan tantangan bagi pemerintahan daerah untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang mampu mengimbangi jumlah pencari pekerjaan.

Jumlah pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan masalah yang dihadapi setiap daerah dalam proses pembangunan di daerahnya. Berikut ini adalah tabel persentase jumlah pengangguran propinsi – propinsi yang berada di Pulau Jawa.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tidak hanya di Propinsi D.I.Yogyakarta saja yang mempunyai masalah mengenai jumlah pengangguran. Angka pengangguran sebesar 1.61 persen di Propinsi D.I.Yogyakarta tahun 2001 lebih kecil dibandingkan jumlah angka pengangguran di Propinsi lain di Pulau Jawa, namun setiap tahunnya jumlah pengangguran mengalami kenaikan.

Tabel 1.4
Persentase Jumlah Pengangguran Menurut Propinsi Di Pulau Jawa
Tahun 2002-2005
(dalam %)

Provinsi / Tahun	Pengangguran Terbuka			
	2002	2003	2004	2005
DKI Jakarta	9.78	9.72	9.67	8.79
Jawa Barat	39.05	33.76	37.23	36.27
Jawa Tengah	19.27	19.02	20.85	22.12
D.I. Yogyakarta	1.61	1.66	1.7	1.89
Jawa Timur	20.82	27.08	23.23	22.18
Banten	9.44	8.74	8.82	8.73

Sumber : BPS Propinsi D.I. Yogyakarta, data diolah.

Hal ini membutuhkan kebijakan dan program pembangunan yang tepat dari pemerintah daerah yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah. Menciptakan lapangan kerja yang produktif merupakan salah satu unsur penting dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan mencapai keseimbangan umum perekonomian daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya ketidakseimbangan antara penambahan jumlah angkatan kerja dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia di Propinsi D.I. Yogyakarta.
- b. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Propinsi D.I. Yogyakarta dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang optimal.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan sehingga sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan agar mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di Propinsi D.I.Yogyakarta dan mendorong sektor-sektor potensial menjadi sektor unggulan.
- b. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan di Propinsi D.I.Yogyakarta dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional, sektor yang memiliki keunggulan relatif terhadap nasional menjadi prioritas sektor yang dikembangkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

Bagi pemerintah daerah propinsi D.I.Yogyakarta, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam upaya menggali sektor – sektor yang layak dikembangkan untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis / Studi Terkait

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi daerah dan indentifikasi sektor basis atau sektor unggulan pada suatu daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Asadin dan Wijaya (2001) telah melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja : terapan model kebijakan prioritas sektoral untuk Kalimantan Timur. Penelitian ini mengemukakan beberapa analisis

indikator penting sebagai masukan bagi formulasi kebijakan, antar lain: sektor ekonomi manakah yang mempunyai ICOR tinggi, manakah sektor – sektor ekonomi Kalimantan Timur yang merupakan sektor basis dan sektor yang lebih berkembang dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional serta menganalisis sektor ekonomi manakah yang memiliki rata – rata kinerja lebih tinggi dibandingkan kinerja sektor dibawahnya. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* dan analisis *Shift-Share*. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investasi di Kalimantan timur cenderung masih mahal. Pada perhitungan komponen *shift share* menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kalimantan timur lebih tinggi dibandingkan beberapa propinsi lain, penyerapan kesempatan kerja sektoral di daerah lebih cepat, kecuali untuk sektor pertanian. Dan secara keseluruhan penelitian yang dilakukan Asadin dan Wijaya menghasilkan urutan optimasi prioritas sektor, sektor pertama adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran; listrik, gas dan air bersih; industri pengolahan; bangunan; jasa – jasa; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; serta terakhir sektor pertanian.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sri Susilo (1999) tentang pergeseran dan prospek sektoral di kabupaten dati II Sleman, Propinsi D.I.Y. Alat analisis yang digunakan adalah *Mix-Share Analysis* dan *Location Quotient*. Pengamatan ini dilakukan secara runtut, data *time series* periode 1981 – 1996. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Sleman DIY yang dapat dikembangkan adalah sektor sewa rumah, jasa, industri pengolahan, bangunan dan perdagangan. Berdasarkan kemampuan regional atas

gambaran mengenai keunggulan komparatif, pemerintah daerah secara bertahap diharapkan konsisten dapat mengembangkan sektor sewa rumah, jasa, industri pengolahan, bangunan dan perdagangan. Kedua alat analisis yang digunakan dapat mempresentasikan secara seimbang mengenai gambaran keunggulan komparatif di kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Marek (2006) melakukan penelitian kinerja ekonomi dan identifikasi sektor – sektor potensial kota Surakarta (1999 – 2004). Penelitian ini menggunakan obyek kota Surakarta untuk menentukan sektor potensial dengan menggunakan pendekatan analisis Klassen tipologi, *LQ* dan analisis *Shift Share*. Hasil Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian kota Surakarta pada tahun 2000 masuk dalam klasifikasi pendapatan rendah, namun pada tahun 2004 kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang tinggi. Kota Surakarta memiliki keunggulan pada sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta jasa – jasa. Perbedaan penelitian ini apabila dibandingkan dengan sebelumnya adalah penggunaan alat analisis yang pernah digunakan tetapi menggunakan variabel yang berbeda.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Data dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data sekunder dan berbentuk data tahunan dari tahun 2001–2005, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta.

- a. Data jumlah tenaga kerja Propinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan lapangan kerja utama dari tahun 2001 – 2005. Data ini menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sembilan sektor lapangan pekerjaan utama yaitu, sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; jasa- jasa di Propinsi D.I. Yogyakarta.
- b. Data jumlah tenaga kerja di Indonesia berdasarkan lapangan kerja utama dari tahun 2001 –2005. Data ini menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sembilan sektor lapangan pekerjaan utama yaitu, sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; jasa- jasa di Indonesia.

1.6.2. Metode Analisis Data.

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor perekonomian Propinsi D.I.Yogyakarta yang layak dikembangkan dan mampu menyumbang tambahan lapangan kerja, maka metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis perencanaan pembangunan yaitu Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*.

1.6.2.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* adalah alat analisis tentang perbandingan besarnya peranan sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share output* sektor *i* di kota dan *share output* sektor *i* di provinsi. Variabel yang dibandingkan adalah nilai tambah atau tenaga kerja (Rahayu, Soebagiyo D,2004).

$$LQ = \frac{E_{ij} / E_j}{E_{in} / E_n}$$

Keterangan :

LQ = Koefisien Location Quotient

E_{ij} = Jumlah tenaga kerja di sektor *i* di wilayah *j* dalam satuan orang

E_j = jumlah tenaga kerja di wilayah *j* dalam satuan orang

E_{in} = Jumlah tenaga kerja di sektor *i* di wilayah nasional dalam satuan orang

E_n = Jumlah tenaga kerja di wilayah nasional dalam satuan orang

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional/wilayah di atasnya, menunjukkan bahwa peranan sektor *i* cukup menonjol di daerah

tersebut. Secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam penyerapan tenaga kerja untuk sektor *i* (mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis).

$LQ < 1$ artinya peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil dalam hal penyerapan tenaga kerja daripada peranan sektor tersebut secara nasional/ pada wilayah di atasnya (sektor nonbasis).

1.6.2.2. Analisis *Shift – Share*

Analisis *Shift Share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan wilayah yang lebih luas, dapat digunakan untuk memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya (Tarigan, 2005 : 85). Dalam penelitian ini analisis *Shift Share* akan membandingkan perbedaan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor di Propinsi D.I.Yogyakarta dengan wilayah nasional.

Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan

untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Model ini juga sering dinamakan *industrial mix analysis*, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk dalam kelompok industri yang cocok dikembangkan di wilayah tersebut. *Mix and share analysis* ini dapat menjelaskan secara deskriptif perubahan tenaga kerja regional selama periode pengamatan dengan metode pengisolasian komponen yang akan menggambarkan perubahan tenaga kerja (Bendavid-Val, 1991:68).

Pada penelitian ini akan digunakan data *employment*. Pertambahan *employment regional total* (ΔE_t) dapat diurai menjadi komponen *shift* dan *share*. Komponen *national share* (N) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode penelitian.

Komponen *shift* merupakan penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertambahan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini akan bernilai positif di daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah yang tumbuh lebih lambat.

Shift netto dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* (P) kadang dikenal dengan komponen struktural atau *industrial mix* dan *differential shift component* (D). *Proportional shift component* mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah

yang bersangkutan. *Differential shift component* (D) dinamakan komponen lokasional atau regional. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan sektor – sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat yang lebih luas yang disebabkan oleh faktor – faktor lokasional intern. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional akan mempunyai nilai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan bernilai negatif (Tarigan, 2005:86-89).

Hubungan antara komponen tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

$$\Delta E_r = E_{r,t} - E_{r,t-n} \dots \dots \dots (1)$$

artinya, pertambahan lapangan kerja regional adalah banyaknya lapangan kerja pada tahun akhir (t) dikurangi dengan jumlah lapangan kerja pada tahun awal (t-n).

Persamaan (1) berlaku untuk total lapangan kerja di wilayah tersebut. Hal ini dapat juga dilihat secara per sektor sebagai berikut.

$$\Delta E_{r,i} = E_{r,i,t} - E_{r,i,t-n} \dots \dots \dots (2)$$

Pertambahan lapangan kerja regional sektor i adalah jumlah lapangan kerja sektor i pada tahun akhir (t) dikurangi dengan lapangan kerja sektor i pada tahun awal (t – n).

Pertambahan lapangan kerja regional sektor i ini dapat diperinci atas pengaruh dari *National Share*, *Proportional Share*, dan *Differential Shift*. Yang bisa dinotasikan dalam bentuk, sebagai berikut

$$\Delta E_{r,i,t} = (Ns + P_{r,i} + D_{r,i}) \dots\dots\dots(3)$$

Peranan *National Share* (Ns_i) adalah seandainya pertambahan lapangan kerja regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja nasional secara rata – rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots(4)$$

Proportional Share ($P_{r,i}$) adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor i pada region yang dianalisis. Dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P_{r,i,t} = \{ (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n}) \} \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots(5)$$

Differential shift ($D_{r,i}$) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah analisis terhadap sektor i secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$D_{r,i,t} = \{ E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n} \} \dots\dots\dots(6)$$

Untuk melihat pengaruh terhadap seluruh wilayah analisis maka angka untuk masing – masing sektor harus ditambahkan. Persamaan untuk seluruh wilayah adalah sebagai berikut.

$$\Delta E_r = (Ns + P_r + D_r) \dots\dots\dots(7)$$

di mana :

$$Ns_t = \sum_{i=1}^n \{ E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \} \dots\dots\dots(8)$$

$$P_{r,t} = \sum_{t=1}^r \left[\left\{ \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n} \right] \dots \dots \dots (9)$$

$$D_{r,t} = \sum_{t=1}^n \left[\left\{ E_{r,i,t} - \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \right\} \right] \dots \dots \dots (10)$$

Keterangan :

Δ = pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t-n)

N = *National* atau wilayah nasional/ wilayah yang lebih tinggi jenjangnya

r = *Region* atau wilayah analisis

E = *Employment* banyaknya lapangan kerja

t = Tahun

t-n = Tahun awal

Ns = *National Share*

Ps = *Proportional Share*

Ds = *Differential shift*

National Share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran banyaknya penyerapan tenaga kerja suatu daerah dengan melihat jumlah penyerapan tenaga kerja daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada wilayah yang lebih tinggi. Hasil perhitungan *Nasional share* akan menggambarkan peranan wilayah nasional yang mempengaruhi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja propinsi. Jika pertumbuhan propinsi sama dengan pertumbuhan nasional maka perannya terhadap nasional tetap,

mengukur apakah daerah tersebut lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional rata – rata.

Proportional shift digunakan untuk melihat pengaruh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor tertentu pada wilayah yang dianalisis. Apabila hasil perhitungan *proportional shift* menunjukkan nilai yang positif berarti sektor tersebut tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian nasional, demikian sebaliknya.

Hasil perhitungan *Differential shift* akan menggambarkan perbedaan antara penyerapan tenaga kerja wilayah yang dianalisis terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja secara nasional pada sektor yang sama. Apabila hasilnya positif maka secara lokasional sektor tersebut menguntungkan atau mempunyai daya saing yang kuat.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai teori – teori yang sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, terutama mengenai Ekonomi Regional.

Bab 3 Gambaran Umum

Gambaran umum daerah yang diteliti dan gambaran tentang variabel – variabel yang diamati.

Bab 4 Analisis Data

Bab ini memuat tentang pembahasan analisis data dan hasil perhitungan dari data yang telah diolah.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan analisis, dan saran – saran yang dianggap perlu dan relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bab ini.